

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara dinyatakan maju bisa dilihat pada kemajuan ekonominya dilihat dari kemandirian masyarakatnya dalam melakukan kegiatan perekonomian. Perbankan di Indonesia didasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi dengan mengikuti prinsip kehati-hatian (Pratama & Fernos, 2019). Tujuan Bank adalah mendorong terselenggaranya stabilitas dan pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata bagi kesejahteraan seluruh warga negara dengan mengumpulkan dan mengelola uang publik.

Kredit merupakan sumber uang bagi masyarakat, dan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.32/POJK.03/2018, organisasi komersial harus memenuhi kebutuhan konsumsi atau meningkatkan kualitas. Oleh karena itu, untuk mengembangkan usahanya, masyarakat memerlukan dukungan berupa permodalan perbankan yang diperoleh melalui kredit. Dunia dikejutkan dengan ditemukannya virus mematikan pada tahun 2019, dan khususnya pada bulan Desember, di Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei, Tiongkok. Virus ini dikenal dengan nama penyakit virus corona atau Covid-19.

Selain berdampak pada sistem kesehatan masyarakat, pandemi ini juga melumpuhkan dunia usaha atau perekonomian. Hal ini bertujuan agar risiko tertular COVID-19 berkurang berkat kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang merupakan salah satu bagian dari upaya pemerintah untuk menghentikan penyebaran virus Covid-19. Adapun aturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2020 tentang berbagai kegiatan yang dilarang selama masa PSBB, seperti kegiatan keagamaan, pendidikan, pekerjaan, dan penggunaan fasilitas umum yang wajib dilakukan WFH (*work from home*).

UMK sendiri memiliki tingkat rentan yang paling tinggi terhadap pandemic Covid-19, karena tingkat pendapatan UMK dihasilkan dari perputaran jual beli setiap harinya. Dengan demikian, apabila UMK tidak dapat menopang krisis ekonomi akibat pandemic, maka akan berdampak besar bagi perekonomian Indonesia. Di Indonesia, UMK memainkan bagian penting dalam perekonomian,

khususnya dalam hal menciptakan lapangan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dilihat dari banyaknya kontribusi lapangan kerja serta ekspor UMKM pada PDB serta penyerapan tenaga kerja mereka secara keseluruhan. Tercatat, kontribusi sektor UMK terhadap PDB meningkat pada tahun 2019 menjadi 60,51%. Sektor UMKM menyumbang 15,65% terhadap ekspor nonmigas secara keseluruhan.

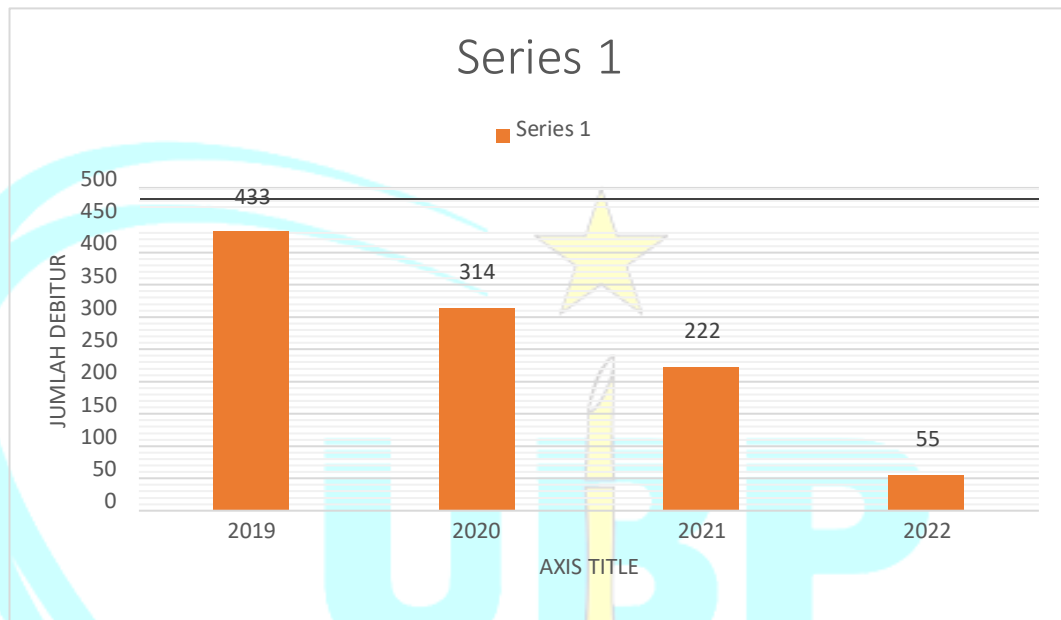
Mereka menghimbau para pekerja yang telah diputus kontraknya untuk menjadi wirausaha pada saat krisis yang berujung pada PHK di beberapa industri dengan mendorong mereka untuk memulai usaha di bidang industri makanan, kerajinan tangan, dan bidang lainnya (Masrunik, 2018). Dalam periode 2019-2021 sebanyak 7.281.778 dan Usaha Kecil sebanyak 615.701 yang dapat memberikan banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dan kemiskinan.

UMKM mempunyai peranan yang amat penting sebagai pengurang tingkatan pengangguran serta kemiskinan dinegara (Alvionita, 2022), namun dalam mencapai itu semua UMKM memiliki keterbatasan, seperti sulit berkembang serta meningkatkan daya saing. Salah satu problematikan yang dihadapi oleh pelaku UMKM yakni perihal modal. Modal menurut Ashari dalam (Istinganah, 2019) merupakan salah satu aspek penting ketika seorang wirausahawan diharuskan mengeluarkan suatu bisnis dengan proses manufaktur.

Pinjaman modal kerja dan investasi yang didukung oleh jaminan dari usaha yang menguntungkan, atau Kredit Usaha Rakyat (KUR), dapat dipergunakan untuk membiayai UMKM. Inisiatif pemerintah bernama Program Kredit Komersial Rakyat (KUR) yang diawasi oleh Presiden Nomor 6 Tahun 2007 berupaya meningkatkan akses UMKM terhadap permodalan. Lembaga keuangan menggunakan mekanisme jaminan untuk menyediakan pendanaan (Alhakam, 2019). UMKM dan koperasi bisa mendapatkan Kredit Usaha Rakyat secara langsung jika diberikan melalui KC ataupun cabang pembantu. Kredit Usaha Rakyat diberikan oleh salah satu bank yakni Bank Tabungan Negara (BTN).

Tercatat periode tahun 2019-2022, Bank BTN mengalami peningkatan pada tahun 2019 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

JUMLAH DEBITUR YANG MENERIMA KUR DI BANK TABUNGAN NEGARA



Terjadinya peningkatan pada tahun 2019 yaitu karna terjadinya fenomena virus *covid-19*, yang menimbulkan banyak nya pekerja di PHK lalu membuat usaha sendiri dan memerlukan kredit untuk permodalan usaha mereka. PT Bank Tabungan Negara, (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bergerak di industri perbankan. BTN akan mendukung seluruh kebutuhan masyarakat saat ini jika perencanaan korporasi lebih terfokus secara sempit. Perbankan personal, bisnis, dan syariah menjadi tiga produk andalan yang berkomitmen BTN tawarkan guna menjadi bank yang mendukung dan melayani industri perumahan. (<https://www.btn.co.id/>)

Kredit bangunan, kredit khusus, kredit ringan, kredit usaha, dan kredit UMKM hanyalah beberapa solusi kredit yang ditawarkan BTN untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Pinjaman UMKM termasuk (KUR) Kredit Usaha Rakyat. Bank BTN menawarkan pinjaman modal kerja kepada usaha-usaha di industri baru dan produktif yang, tergantung pada ukurannya, termasuk dalam kategori Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), tetapi belum memiliki agunan tambahan atau memiliki jaminan lebih lanjut yang tidak mencukupi (Alvionita, 2022).

Bank Tabungan Negara memerlukan sistem atau proses pemberian kredit yang didukung oleh syarat dan ketentuan serta mencatat transaksi sesuai dengan persyaratan hukum yang berkaitan dengan industrinya. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi alokasi pinjaman. Tiga definisi “efektivitas” diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kemanjuran disini maksudnya kemampuan bank dalam mengeluarkan kredit kepada nasabah yang tepat, terutama yang kekurangan kredit pada bank lain atau yang mematuhi aturan pemberian kredit. Menurut (Tabe, 2019), efisiensi adalah kemampuan bank untuk mempersingkat waktu analisis selama proses kredit atau ketika mengambil keputusan pemberian kredit, sehingga kredit dapat diberikan sesuai jadwal dan dalam jangka waktu yang ditentukan. Efisiensi didefinisikan sebagai metode untuk mengukur dan membandingkan input dan output, atau untuk membandingkan hasil yang diperoleh dengan sumber daya dan tenaga kerja yang digunakan.

Menurut Kristanto (2018:1), terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang terhubung bekerja sama untuk memproses masukan tersebut hingga keluaran yang diinginkan tercipta. Instrumen untuk mengkomunikasikan informasi dengan cara yang dapat digunakan oleh penerimanya adalah sistem informasi. Untuk membantu sinergi organisasi dalam proses pengambilan keputusan peraturan, saran tentang cara meluncurkan, mengelola, dan mengembangkan perusahaan dimaksudkan (Ii & Teori, 2019). Sistem informasi yang diterapkan di Bank Tabungan Negara untuk program KUR masih hanya mengandalkan media cetak seperti brosur dan website, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Cabang Bank Tabungan Karawang.

Sistem adalah sekelompok bagian yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, seperti dapat disimpulkan dari penjelasan di atas (Jayanti, 2021). Informasi akuntansi yang disediakan oleh manajemen perusahaan harus memenuhi berbagai standar kualitas. Sistem informasi akuntansi terdiri dari koordinasi orang, alat, dan strategi interaksi dalam kerangka organisasi tertentu untuk menciptakan informasi akuntansi keuangan dan informasi manajemen yang terorganisir. Manfaat akan

diperoleh sistem informasi akuntansi apabila tetap berfungsi dengan baik. Sistem informasi akuntansi menurut Azhar Susanto (2019:80) adalah pengelompokan (integrasi) sub-sub sistem atau komponen baik fisik maupun non fisik yang saling mereplikasi. Untuk mentransformasikan data transaksi yang berkaitan dengan keuangan menjadi informasi keuangan, hubungan dan kerja sama harus dijaga.

Penelitian ini pada dasarnya mengacu pada penelitian Puspita, Nurjanah Dewi (2022) yang berjudul “Penerapan Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia Branch Office Surabaya Kapas Krampung, menunjukkan bahwa tata cara pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Implementasi Pull Hotel Unit Sidoarjo berhasil dimulai dari tahap pengajuan kredit, meliputi tahap analisa kredit yaitu disposisi kredit, perjanjian kredit, pencairan kredit dan monitoring kredit. Analisis kredit mencakup 5C ((Karakter, Kapasitas, Modal, Agunan, Kondisi), disposisi kredit, perjanjian kredit, pencairan kredit, dan pemantauan kredit.

Berdasarkan uraian di atas, Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tujuannya untuk menganalisis Sistem Informasi Akuntansi pada pemberian KUR. Peneliti mengangkat masalah tersebut dalam skripsi dengan judul **“ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (Studi Kasus Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Karawang)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, penulis mengidentifikasi masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Sistem informasi yang diterapkan pada Bank Tabungan Negara Persero Tbk Kantor Cabang Kota Karawang masih hanya mengandalkan sistem web dan media cetak.
2. Sistem pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Tabungan Negara Persero Tbk Kantor Cabang Kota Karawang akan diberikan kepada yang belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup

3. Kurangnya modal usaha adalah alasan utama disediakannya Kredit Usaha Rakyat (KUR).

1.3. Batasan Masalah

Tujuan penelitian dapat dicapai dengan cara membatasi suatu permasalahan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, mempermudah penjelasan, dan menjadikan penelitian lebih terkonsentrasi. Penelitian peneliti terkendala karena hanya Bank Tabungan Negara Persero Tbk Cabang Kota Karawang yang menggunakan prosedur wawancara untuk pengumpulan data.

1.4. Rumusan Masalah

Untuk mencapai maksud dan tujuan yang telah ditetapkan serta memperoleh hasil yang diinginkan, maka perlu bagi peneliti untuk merumuskan masalah yang akan memudahkan mereka untuk fokus pada masalah yang akan diselidiki. Penjelasan dan latar belakang tersebut mengarahkan peneliti untuk merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem informasi yang diterapkan oleh Bank Tabungan Negara Persero Tbk Kantor Cabang Kota Karawang.
2. Apa manfaat dari kebijakan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Tabungan Negara Persero Tbk Kantor Cabang Kota Karawang?
3. Apa saja syarat persetujuan yang harus diajukan terkait pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)?
4. Apakah pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah berjalan efektif sesuai tujuan yang ditetapkan?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis berkaitan dengan rumusan masalah di atas yaitu sebagai berikut :

1. Menganalisis sistem informasi yang diterapkan oleh Bank Tabungan Negara Persero Tbk Kantor Cabang Kota Karawang.
2. Menganalisis manfaat kebijakan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Tabungan Negara Persero Tbk Kantor Cabang Kota Karawang.

3. Menganalisis syarat persetujuan untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
4. Mendeskripsikan sistem informasi pada pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman akademisi mengenai pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan pemberian kredit dalam bisnis.

2. Bagi perusahaan

Sebagai faktor yang harus diperhitungkan saat mengambil keputusan mengenai keputusan kredit dan sistem informasi akuntansi..

3. Bagi Mahasiswa

Dapat menyediakan data yang akan membantu informasi lainnya, seperti mahasiswa akuntansi, memperoleh lebih banyak pengetahuan dan pemahaman serta berfungsi sebagai titik awal untuk penelitian tambahan..

